



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 18 Mei 2012

Halaman: 2

Balaikota Jadi Kawasan Bebas Rokok

YOGYA (KR) - Seluruh gedung perkantoran yang ada di kompleks Balaikota Yogyakarta kini tengah dipersiapkan untuk menjadi kawasan bebas asap rokok. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta juga mewacanakan akan merumuskan payung hukum berupa perda.

Menurut Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta, Ika Rostika, merujuk pada perda nomor 5 tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DIY, seluruh gedung perkantoran memang harus terbebas dari asap rokok.

"Sekarang kami berupaya supaya tidak ada lagi yang merokok di gedung perkantoran, baik yang ada di Balaikota maupun di luar Balaikota. Rumusnya se-

dang kami siapkan," terangnya saat dihubungi, Kamis (17/5).

Sebagai konsekuensi larangan merokok di area gedung perkantoran, lanjut Ika, maka pemerintah akan memperbanyak ruangan khusus untuk merokok. Saat ini, Pemkot Yogyakarta baru memiliki 3 ruangan khusus merokok, yaitu tersebar di kompleks Balaikota, Kantor BLH dan Kantor Samsat.

Untuk melakukan penambahan ruangan bebas merokok tersebut, diakuinya bukan hal yang mudah. Hal

an Gedung dan Aset Daerah," paparnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tuty Setyowati juga akan mendukung penuh kawasan bebas rokok di seluruh perkantoran. Salah satu bentuk dukungannya ialah dengan memperluas klinik konsultasi bebas merokok yang ada di Balaikota Yogyakarta.

Namun demikian, Tuty juga mengakui jika partisipasi pegawai yang ada di lingkungan Balaikota untuk memanfaatkan klinik konsultasi bebas merokok masih sangat rendah. Dalam satu bulan, hanya ada satu hingga dua orang saja yang datang berkonsultasi. Berbeda dengan klinik yang ada di Puskesmas, dimana dalam sebulan bisa mencapai 8 orang. (M-6)-a

ILUSTRASI JOS

ini karena areal perkantoran di Kota Yogyakarta sudah sangat sempit sehingga perlu melibatkan berbagai instansi untuk mencari solusi. "Kami juga akan meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi DIY supaya ikut menyediakan ruangan khusus ini. Karena mereka kan memiliki kompensasi dari pajak tembakau. Sedang lokasi ruangnya akan kami diskusikan dengan Dinas Bangun-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
3. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005